

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi suatu negara, dalam industri pariwisata suatu negara atau lebih tepatnya pemerintah daerah tempat suatu objek wisata berada akan memperoleh pendapatan dari masing-masing objek wisata tersebut. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan setiap orang, alasannya adalah kegiatan perjalanan pribadi dapat meningkatkan kreativitas, menghilangkan gangguan pekerjaan, hiburan, belanja dan bisnis, serta kesalahpahaman ras tertentu, kesehatan dan wisata spiritual. Karena semakin pendeknya jam kerja, seiring dengan bertambahnya waktu luang, pendapatan meningkat, dan aktivitas pariwisata juga akan meningkat (fahmi dan ilhami, 2022). seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan, dan pemajuan budaya.

Pemerintah mengatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS) Tahun 2010–2025. Dokumen ini memuat arah dan strategi pembangunan pariwisata secara nasional, dengan prinsip pengembangan yang sistematis, terpadu, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Dalam perspektif pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat lokal tidak lagi hanya dianggap sebagai penonton, tetapi sebagai aktor penting dalam keseluruhan proses pembangunan pariwisata.

Di era otonomi daerah dan desentralisasi yang dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

(kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014), tanggung jawab pengembangan potensi daerah, termasuk pariwisata, mulai dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Namun, tantangan kapasitas fiskal dan administratif yang tidak merata membuat pemerintah kabupaten atau provinsi kerap tidak mampu menjangkau semua potensi lokal secara optimal. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk pengembangan pariwisata berbasis desa.

Lahirnya UU Desa membawa paradigma baru dalam pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah desa kini memiliki posisi yang strategis sebagai aktor utama dalam pembangunan berbasis komunitas. Mereka bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari atas, tetapi juga sebagai perancang dan pengelola inisiatif pembangunan lokal berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pariwisata, hal ini membuka peluang besar bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui berbagai regulasi juga mendorong pengembangan potensi desa, salah satunya melalui pemanfaatan Dana Desa. Dana Desa ini dapat menjadi satu wadah dan acuan dalam pengembangan potensi desa terkhususnya pengembangan bidang pariwisata. Dana Desa dapat menjadi pondasi utama dalam pengembangan potensi desa dalam bidang pariwisata.

Salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi wisata alam dan budaya yang tinggi yang bisa dikembangkan dengan Dana desa adalah Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Desa ini terletak di kawasan pegunungan Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki daya tarik wisata alam berupa hamparan sawah, udara sejuk, serta beberapa lokasi yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis alam.

Meskipun Kampong Galung di Desa Barania telah menunjukkan geliat sebagai destinasi wisata berbasis alam dengan potensi besar, realitas pengelolaan masih menyisakan sejumlah persoalan penting. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata belum terstruktur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga keterlibatan warga cenderung musiman dan tidak menyentuh aspek strategis seperti perencanaan bersama maupun pengawasan. Padahal, jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan tren yang menjanjikan. Tercatat pada libur Lebaran tahun ini, Kampong Galung menerima 2.076 pengunjung (Jadesta), dengan kontribusi ekonomi yang tampak dari tarif masuk sebesar Rp2.000 per orang (Jadesta) serta penyewaan gazebo sekitar Rp20.000 per jam (Pusdalsuma). Kehadiran wisatawan tersebut membuka peluang ekonomi yang nyata bagi masyarakat, namun pemanfaatannya belum optimal.

Di sisi lain, Desa Barania juga mulai memperlihatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Penelitian terdahulu mencatat adanya peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha kecil seperti warung makanan, area parkir, penyewaan gazebo, hingga kolam renang di sekitar lokasi wisata (Repositori UIN Alauddin Makassar). Pada tahun 2024, bahkan telah dilaksanakan pelatihan legalitas usaha yang diikuti oleh 7 pelaku UMKM untuk memperkuat pemahaman tentang izin usaha dan sertifikasi produk (Sinjai Info). Meskipun demikian, jumlah UMKM yang terlibat masih terbatas, dan pola kerja sama dengan pemerintah desa belum menunjukkan bentuk kelembagaan formal seperti BUMDes atau Pokdarwis. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara peluang ekonomi yang ada dengan kapasitas kelembagaan pengelolaan wisata.

Kampong Galung juga telah memperoleh pengakuan di tingkat nasional, terbukti dengan keberhasilan Desa Barania masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 dan meraih Juara I kategori CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability) (Antara News Makassar). Namun,

capaian prestisius tersebut belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas dasar yang memadai. Penelitian UIN Alauddin Makassar menunjukkan adanya keluhan dari pelaku usaha terkait kurangnya sarana WC, tempat sampah, serta meteran listrik pribadi, ditambah keterbatasan modal dan dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur. Situasi ini menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi Kampong Galung bukan hanya pada tingginya potensi dan pengakuan, melainkan pada lemahnya tata kelola, partisipasi yang belum terstruktur, keterbatasan fasilitas, dan ketiadaan lembaga formal pengelola wisata. Oleh karena itu, penelitian mengenai pola kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi sangat penting sebagai solusi untuk mewujudkan pengelolaan wisata yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Desa Barania, secara geografis terletak di dataran tinggi, menjadikannya memiliki keunggulan dalam wisata ekowisata dan wisata petualangan (*adventure tourism*). Namun, hingga saat ini, pengelolaan potensi wisata di desa ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih terbatasnya promosi, infrastruktur pendukung, dan terutama rendahnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan potensi tersebut belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Hal ini menjadi indikasi bahwa belum terbangun kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan antara kedua aktor utama tersebut.

Dengan demikian, analisis mengenai kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Barania diperlukan sebagai langkah awal menuju terbentuknya model pengelolaan wisata desa yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Apabila pemerintah desa mampu membangun pola kemitraan partisipatif dengan masyarakat, maka pengembangan wisata di Barania dapat memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dampak ekonomi misalnya berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan warga, serta tumbuhnya usaha mikro seperti homestay, kuliner lokal, dan

kerajinan tangan. Dampak sosial muncul dalam bentuk meningkatnya rasa kebersamaan dan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Sedangkan dampak budaya berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai lokal, tradisi, dan kearifan lokal yang dijadikan bagian dari daya tarik wisata.

Tentunya dalam pengembangan potensi ini, memerlukan adanya mitra yang sesuai agar hasil yang diperoleh maksimal dan memuaskan pemerintah daerah, masyarakat bahkan wisatawan. Kemitraan dalam pengelolaan wisata berbasis desa bukan sekadar pembagian tugas administratif antara pemerintah desa dan masyarakat. Kemitraan ini seharusnya bersifat substantif, yakni mencakup aspek perencanaan bersama, pembagian peran yang adil, pengambilan keputusan secara demokratis, dan pembagian manfaat secara proporsional. Kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat adalah landasan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Hal ini mengacu pada kolaborasi yang erat antara pemerintah desa dan warganya untuk mencapai tujuan bersama dalam hal pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Kemitraan ini memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat demokrasi lokal. Kemitraan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat mencakup partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, menyuarakan kebutuhan mereka, dan mengambil bagian dalam perencanaan pembangunan (Aquatama *et al*, 2024).

Dalam konteks pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania, peran pemerintah desa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pengembangan pariwisata berbasis desa menuntut adanya sinergi antara berbagai aktor lokal, mulai dari pemerintah desa, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga pemuda desa. Oleh karena itu, pendekatan Collaborative Governance menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika kemitraan tersebut. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007),

menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan kolaboratif antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam kerangka yang formal, partisipatif, dan berbasis konsensus. Dalam kerangka ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator utama, sedangkan masyarakat menjadi mitra aktif yang ikut merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pengelolaan wisata. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya tata kelola wisata yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Relevansi teori ini semakin kuat jika dikaitkan dengan kondisi nyata di Desa Barania. Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, terutama di destinasi Kampong Galung, pengelolaan pariwisata hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti partisipasi masyarakat yang belum terstruktur, kelembagaan pengelola wisata yang belum terbentuk secara formal, serta belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Padahal, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan potensi alam, tetapi juga oleh sejauh mana aktor-aktor lokal dapat membangun kemitraan yang kuat dan saling percaya dalam tata kelola wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan teori Collaborative Governance bukan hanya sebagai pendekatan konseptual, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan pengembangan wisata Kampong Galung. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Kampong Galung di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai” sebagai upaya untuk menjawab permasalahan kemitraan dan memberikan landasan akademik bagi penguatan tata kelola wisata desa secara kolaboratif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, Maka peneliti dapat merumuskan sebuah masalah yang di teliti adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana bentuk kemitraan antara pemerintah Desa Barania dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung berdasarkan teori Collaborative Governance
- 2 Apa saja yang mempengaruhi dalam upaya membangun kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan masyarakat di destinasi wisata Kampong Galung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Desa Barania dalam pengelolaan wisata Kampong Galung berdasarkan teori Collaborative Governance di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai berdasarkan teori Collaborative Governance.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan masyarakat di destinasi wisata Kampong Galung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami dinamika kemitraan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata berbasis lokal, dengan pendekatan teori Collaborative Governance.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan wisata yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat Desa Barania, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pengelolaan wisata Kampong Galung untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian budaya.
3. Bagi pengelola wisata, seperti Pokdarwis dan BUMDes, penelitian ini dapat memberikan gambaran strategis dalam membangun kolaborasi yang efektif antara berbagai aktor lokal

1.4 Tinjauan pustaka

1.4.1 Collaborative Governance

Collaborative governance adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, Collaborative Governance merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik (Kirana dan arista, 2020).

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau aset publik. Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas Collaborative Governance hingga Emerson, Nabatchi dan Balogh menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan

kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level Pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama” (Wiratama dan Wahyuni, 2022).

1.4.2 Tata Kelola Desa Wisata dan Kemitraan Berdasarkan Teori Collaborative Governance

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Andre dkk, (2022) terdapat kutipan yang dimana, menurut Ansell & Gash (2008, h.544-545) Collaborative governance adalah pengaturan dimana terdapat satu atau lebih badan publik yang secara langsung melibatkan non-state aktor dalam proses pengambilan keputusan kolektif, berorientasi konsensus, serta deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan, program, atau aset publik. Begitu pula menurut Emerson & Nabatchi (2015, h.2) bahwa kolaborasi yang dilakukan tidak hanya terdiri atas pemerintah selaku aktor, namun juga pihak lainnya, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan publik.

Kolaborasi Pemerintahan adalah proses pembentukan, penggerakan, fasilitasi, operasionalisasi, dan pemantauan pengaturan organisasi lintas sektoral dalam menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau publik saja. Dalam konteks ini, Kolaborasi Pemerintahan adalah model, di mana dalam mengembangkan suatu daerah, pemerintah tidak dapat mengelola daerahnya secara mandiri, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi dominan, peran dan fungsi pemangku kepentingan lain diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan mengakomodasi kebutuhan publik (Prasetyo, 2023).

1.4.3 Pemerintah Desa sebagai Aktor Pembangunan Lokal

Pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan di tingkat lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan, pemberdaya masyarakat, serta penjaga stabilitas sosial dan budaya. Pasal 26 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari top-down ke bottom-up dalam pembangunan desa.

UU Desa merupakan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat peran pemerintah desa dalam melakukan pembangunan di wilayah perdesaan dengan memaksimalkan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Desa memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. pembangunan pada dasarnya adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat, pada jurnal penelitian Masalah-Masalah Sosial Huda (2020) terdapat sebuah kutipan (Soetomo, 2013: 314). Setiap upaya pembangunan baik di pusat maupun daerah, seperti perdesaan, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki setiap desa, seperti potensi pariwisata.

Sebagai aktor lokal, pemerintah desa juga memiliki kapasitas untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Oleh karena itu, pemerintah desa memegang peran penting dalam menciptakan tata kelola wisata yang berkeadilan,

transparan, dan partisipatif. Kemampuan pemerintah desa untuk membangun sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan wisata desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata desa, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial, melainkan mencakup keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam sebuah jurnal administrasi negara safitri *et al* (2020) terdapat sebuah kutipan dimana menurut Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup empat aspek utama: partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Arnstein (1969) dalam konsep "*Ladder of Citizen Participation*" menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam delapan tingkatan, dari non-participation (manipulasi dan terapi) hingga citizen control (kontrol warga). Dalam pengelolaan wisata desa, tingkatan partisipasi ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas keterlibatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula kemungkinan keberhasilan dan keberlanjutan program wisata desa.

Menurut Pretty (1995), partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan dalam tujuh tingkat, mulai dari partisipasi pasif, partisipasi dalam penyediaan informasi, konsultasi, hingga partisipasi interaktif. Partisipasi interaktif menjadi bentuk yang paling ideal dalam pengelolaan wisata, di mana masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama secara setara dalam menyusun visi, misi, serta langkah-langkah konkret pengembangan wisata. Dalam praktiknya, menciptakan partisipasi interaktif

membutuhkan pendekatan komunikatif, edukatif, dan penguatan kapasitas lokal.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap objek wisata dan meningkatkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat harus menempatkan partisipasi sebagai prinsip utama, bukan sekadar pelengkap.

1.4.5 Pengelolaan Pariwisata di Desa Barania

Pengelolaan pariwisata di desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan desa yang berbasis potensi lokal. Dalam konteks Desa Barania, yang terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, pengelolaan pariwisata diarahkan untuk memaksimalkan potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Desa ini dikenal memiliki destinasi yang menjanjikan, seperti Kampong Galung, yang memadukan keindahan alam perbukitan, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan yang otentik. Sejumlah penelitian dan literatur tentang pengelolaan wisata desa menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat serta peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dan pengelola.

Menurut Nuryanti (1993), pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam merancang, mengelola, dan mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata. Konsep ini menjadi relevan dengan pendekatan yang dilakukan di Desa Barania, di mana keterlibatan warga menjadi kunci dalam mengelola destinasi wisata seperti Kampong Galung. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada peran sebagai penyedia jasa atau tenaga kerja, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pemilik inisiatif.

Selanjutnya, Suansri (2003) menyatakan bahwa *community-based tourism* juga menuntut adanya penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola yang demokratis. Hal ini mencakup pelatihan, pendampingan, serta pembentukan lembaga-lembaga lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atau BUMDes, yang dapat berperan sebagai pengelola utama destinasi. Di Desa Barania, peran kelembagaan seperti Pokdarwis sangat penting untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mengatur pembagian tugas, hasil, dan tanggung jawab secara adil dan transparan.

1.4.6 Indikator Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Collaborative Governance

Kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis desa dapat dianalisis menggunakan indikator yang dikembangkan dalam konsep *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008). Menurut mereka, kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama biasa, tetapi sebagai sebuah proses tata kelola yang menempatkan setiap pemangku kepentingan dalam posisi setara, saling terhubung, dan saling bergantung dalam mewujudkan tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif harus memiliki alur komunikasi yang jelas, kesetaraan akses dalam proses pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat yang adil dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks desa wisata, indikator kemitraan ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keterlibatan dan kontribusi masing-masing pihak terhadap keberlanjutan destinasi wisata.

Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kemitraan memiliki beberapa elemen penting, antara lain *trust-building*, *face-to-face dialogue*, *shared understanding*, serta *intermediate outcomes* yang menunjukkan hasil sementara dari proses kolaborasi. Konsep ini kemudian dapat dikembangkan menjadi indikator operasional yang relevan dalam menilai dinamika kemitraan di tingkat desa. Dalam penelitian ini, kemitraan antara Pemerintah Desa Barania dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung dianalisis melalui lima indikator utama yaitu: kepercayaan, komunikasi,

komitmen bersama, kapasitas dan sumber daya, serta pembagian peran dan tanggung jawab.

a. Drivers / Pemicu Kolaborasi

Dalam teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), drivers atau pemicu kolaborasi merupakan faktor awal yang mendorong terbentuknya proses kolaborasi antara berbagai pihak. Drivers ini muncul ketika terdapat kondisi atau permasalahan tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor untuk mencapai solusi bersama.

Pemicu kolaborasi biasanya muncul karena adanya kebutuhan bersama, peluang yang dapat dimanfaatkan secara kolektif, ataupun tekanan dari lingkungan sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang mendorong berbagai pihak untuk bekerja sama. Faktor pemicu ini dapat berupa kepemimpinan yang mendorong kolaborasi, adanya ketergantungan antar pihak, serta adanya insentif atau manfaat yang dapat diperoleh melalui kerja sama. Dalam konteks collaborative governance, drivers menjadi elemen penting karena menentukan apakah proses kolaborasi dapat terbentuk atau tidak. Ketika para aktor memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu tujuan atau melihat adanya peluang yang dapat dicapai melalui kerja sama, maka mereka akan terdorong untuk membangun kolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, drivers berfungsi sebagai faktor yang menginisiasi terbentuknya proses kolaborasi antara berbagai pihak dalam mengelola suatu program atau kebijakan secara bersama.

b. Principled Engagement (Keterlibatan Para Pihak)

Principled engagement dalam collaborative governance merujuk pada proses keterlibatan para pihak dalam melakukan interaksi, diskusi, serta perumusan keputusan secara bersama. Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bahwa proses ini

melibatkan beberapa tahapan penting, seperti discovery (penemuan isu bersama), definition (pendefinisian masalah), deliberation (diskusi atau musyawarah), dan determination (penentuan keputusan bersama).

Melalui principled engagement, berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat menyampaikan pandangan, kepentingan, serta ide-ide yang mereka miliki. Proses ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang terbuka serta memberikan ruang bagi setiap aktor untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan para pihak dalam collaborative governance tidak hanya sebatas kehadiran dalam pertemuan atau diskusi, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam merumuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan adanya keterlibatan yang aktif, setiap pihak dapat memahami perspektif pihak lain serta menemukan titik temu yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bersama.

Oleh karena itu, principled engagement menjadi proses penting dalam collaborative governance karena melalui keterlibatan yang konstruktif, kolaborasi dapat berjalan secara lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

c. Shared Motivation (Kepercayaan, Komitmen, dan Mutual Understanding)

Shared motivation merupakan unsur penting dalam collaborative governance yang berkaitan dengan terbentuknya hubungan sosial yang kuat antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bahwa shared motivation mencakup beberapa elemen utama, yaitu kepercayaan (trust), komitmen (commitment), serta pemahaman bersama (mutual understanding). Kepercayaan menjadi dasar utama dalam membangun hubungan kerja sama yang efektif antara berbagai pihak. Ketika para aktor saling percaya satu sama lain, maka mereka akan lebih terbuka dalam berbagi informasi serta bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Selain itu, komitmen juga menjadi faktor penting dalam shared motivation. Komitmen menunjukkan kesediaan para pihak untuk terus terlibat dalam proses kolaborasi serta menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Sementara itu, mutual understanding atau pemahaman bersama merupakan kondisi di mana para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, peran, serta manfaat dari kolaborasi yang dilakukan. Dengan adanya pemahaman bersama, proses kolaborasi dapat berjalan dengan lebih harmonis karena setiap pihak mengetahui arah dan tujuan dari kerja sama yang dilakukan.

Dengan demikian, shared motivation menjadi faktor yang memperkuat hubungan kerja sama antara berbagai pihak dalam collaborative governance.

d. Capacity for Joint Action (Kapasitas untuk Bertindak Bersama)

Capacity for joint action dalam collaborative governance merujuk pada kemampuan para pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk melaksanakan tindakan bersama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, kelembagaan, kepemimpinan, serta ketersediaan aturan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan kolaborasi. Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya komunikasi dan kepercayaan antar pihak, tetapi juga membutuhkan kapasitas yang memadai untuk menjalankan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Kapasitas tersebut dapat berupa kemampuan organisasi dalam mengelola program, ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan, serta adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Selain itu, adanya struktur kelembagaan yang jelas juga menjadi bagian penting dari capacity for joint action. Struktur kelembagaan ini membantu dalam mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

Dengan adanya kapasitas yang memadai, proses kolaborasi tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan atau diskusi, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

e. Bentuk Kerja Sama yang Terjadi (Formal dan Informal)

Dalam collaborative governance, bentuk kerja sama yang terjadi antara berbagai pihak dapat bersifat formal maupun informal. Kerja sama formal biasanya terbentuk melalui aturan, kebijakan, ataupun struktur kelembagaan yang secara resmi mengatur hubungan kerja antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Kerja sama formal memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan adanya aturan yang jelas, proses kolaborasi dapat berjalan secara lebih terstruktur serta memiliki dasar hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan bersama.

Di sisi lain, kerja sama informal biasanya terbentuk melalui hubungan sosial yang berkembang secara alami dalam masyarakat, seperti budaya gotong royong, kepercayaan antar individu, serta partisipasi sukarela dalam berbagai kegiatan bersama. Kerja sama informal ini sering kali menjadi faktor penting yang memperkuat hubungan antar pihak dalam collaborative governance. Kedua bentuk kerja sama tersebut saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan kolaborasi. Kerja sama formal memberikan kerangka kelembagaan yang jelas, sedangkan kerja sama informal memperkuat hubungan sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kolaborasi.

Dengan demikian, keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam membangun kerja sama yang baik, baik melalui mekanisme formal maupun melalui hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

1.5 Kerangka Berpikir

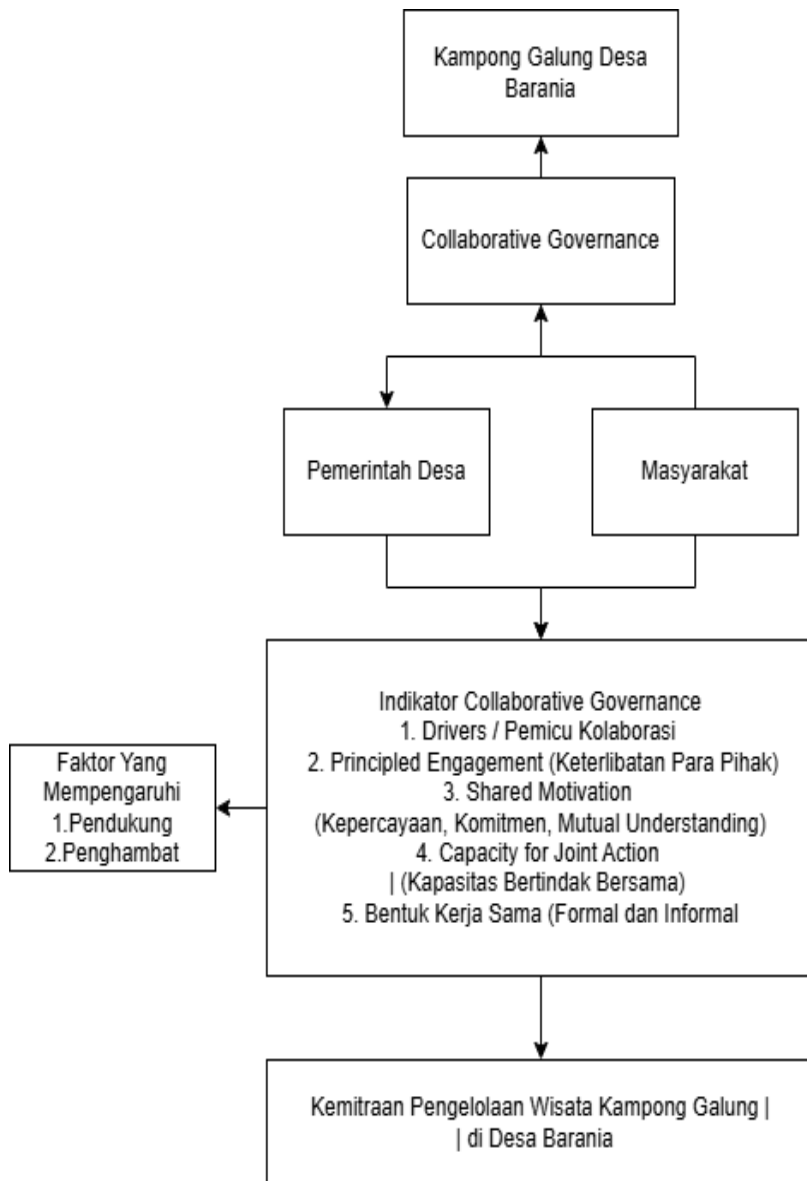
Pengelolaan wisata berbasis desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan potensi alam dan budaya, tetapi juga oleh sejauh mana hubungan kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terbangun secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Wisata Kampong Galung di Desa Barania, kemitraan tersebut menjadi aspek krusial karena sektor pariwisata desa memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dukungan kelembagaan pemerintah desa, serta sinergi dengan aktor-aktor lokal lainnya seperti pelaku UMKM dan tokoh masyarakat.

Teori Collaborative Governance yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007) menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa proses tata kelola kolaboratif melibatkan kerja sama formal antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis konsensus. Dalam konteks Desa Barania, kolaborasi ini mencakup perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan wisata yang melibatkan pemerintah desa sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai mitra aktif. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan tercipta tata kelola wisata yang transparan, inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pola hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pemerintah desa memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan, menyediakan dukungan regulatif, serta menciptakan ruang dialog bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat memiliki peran aktif dalam memberikan ide, mendukung pelaksanaan, serta ikut menjaga kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata. Hubungan ini tidak bersifat satu arah, melainkan bersifat timbal balik (*mutual process*) yang dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi terbuka, dan komitmen bersama.

Dalam praktiknya, pengelolaan wisata Kampong Galung saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain partisipasi

masyarakat yang belum terstruktur, kelembagaan pengelola wisata yang belum formal, serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi wisata sebagai sumber ekonomi lokal. Melalui pendekatan Collaborative Governance, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat diperkuat agar tata kelola wisata menjadi lebih profesional dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kemitraan antara pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial, nilai-nilai lokal, dan dinamika interaksi antar aktor secara kontekstual dan menyeluruh. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, peneliti berusaha menangkap makna, peran, serta strategi kolaboratif yang dijalankan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam mewujudkan tata kelola wisata yang partisipatif dan berkelanjutan.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki destinasi wisata Kampong Galung yang menjadi fokus dalam studi kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaannya. Desa Barania juga merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam dan budaya lokal, serta menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata desa. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu Bulan, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung dan interaksi intensif dengan berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung

2.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan secara saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kemitraan antara

pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari para informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa yang terlibat dalam bidang pariwisata dan pembangunan, perwakilan BUMDes, tokoh masyarakat, pemuda desa yang aktif dalam kegiatan wisata, serta pelaku UMKM lokal. Data primer ini berfungsi sebagai sumber utama untuk menggali pandangan, pengalaman, serta dinamika kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata Kampong Galung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data ini mencakup dokumen RPJMDes Barania, laporan kegiatan wisata, peraturan desa terkait pariwisata, data profil Desa Barania, serta dokumentasi visual seperti foto, brosur, dan catatan rapat desa. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap temuan di lapangan serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap praktik pengelolaan wisata.

2.4 Informan Penelitian

Informan adalah individu yang dipilih secara khusus dalam penelitian kualitatif karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap isu atau objek yang diteliti. Informan berfungsi sebagai sumber utama data primer melalui wawancara mendalam, karena mereka dapat memberikan informasi yang kaya dan relevan mengenai konteks sosial yang sedang dianalisis.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan

penelitian. Informan utama meliputi Kepala Desa Barania, yang berperan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan wisata Kampong Galung. Selain itu, anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat dalam aspek pengelolaan ekonomi kawasan wisata juga dijadikan informan. Penelitian ini juga melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat desa yang memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa, termasuk sektor pariwisata.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat dan pemuda desa yang aktif dalam kegiatan sosial serta inisiatif pengembangan wisata lokal juga dilibatkan untuk memberikan perspektif mengenai nilai-nilai adat, budaya, serta bentuk partisipasi masyarakat. Untuk memperluas sudut pandang, beberapa pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata Kampong Galung turut diwawancarai guna mengungkap kontribusi ekonomi yang mereka rasakan dari aktivitas wisata. Selain itu, dinas terkait di tingkat kabupaten, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai, juga dimasukkan sebagai informan pendukung untuk memberikan pandangan kebijakan dan program pengembangan pariwisata daerah yang berkaitan langsung dengan Desa Barania.

Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah: (1) memiliki peran langsung dalam pengelolaan atau pengembangan wisata Kampong Galung, (2) memiliki pengalaman dan keterlibatan aktif dalam kegiatan desa atau UMKM yang mendukung pariwisata, (3) memahami dinamika sosial dan budaya lokal yang berhubungan dengan pariwisata, serta (4) dapat memberikan informasi relevan mengenai tantangan maupun peluang dalam pengembangan wisata desa.

Secara keseluruhan, jumlah informan yang direncanakan dalam penelitian ini sekitar 12–15 orang, terdiri atas Kepala Desa, perwakilan BUMDes, perwakilan BPD, tokoh masyarakat, pemuda desa, pelaku UMKM, serta pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai. Dengan komposisi ini, diharapkan data yang diperoleh

dapat menggambarkan secara menyeluruh dinamika kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bentuk, mekanisme, serta dinamika kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga teknik-teknik yang diterapkan harus mampu menangkap realitas sosial secara utuh, kontekstual, dan mendalam. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan metode utama dalam pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka kepada para informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan wisata Kampong Galung. Informan meliputi kepala desa, aparat desa yang membidangi pariwisata, tokoh masyarakat, pemuda desa yang terlibat dalam kegiatan wisata, serta pelaku UMKM lokal. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas dan terbuka. Teknik ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan tentang peran masing-masing pihak dalam pengelolaan wisata, hambatan yang dihadapi, serta harapan terhadap keberlanjutan wisata Kampong Galung.

2. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian dan ikut menyaksikan berbagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan wisata. Observasi ini mencakup kegiatan-kegiatan masyarakat, peran aparat desa, interaksi antara warga dan pengunjung, serta pengamatan terhadap sarana dan prasarana wisata yang tersedia di Kampong Galung. Melalui observasi partisipatif, peneliti tidak hanya mencatat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga berupaya memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi proses kemitraan dalam pengelolaan wisata. Observasi ini sangat penting untuk memperkaya temuan wawancara dan memberikan bukti empiris atas praktik yang berlangsung di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi dan informal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang ditelusuri antara lain adalah Peraturan Desa tentang pariwisata, laporan kegiatan pengembangan wisata Kampong Galung, data statistik desa, foto kegiatan, serta catatan-catatan program pemberdayaan masyarakat. Studi dokumentasi ini berguna untuk memverifikasi data hasil wawancara dan observasi, serta memberikan landasan hukum dan administratif terhadap keberadaan dan perkembangan wisata Kampong Galung. Selain itu, dokumen juga membantu menunjukkan sejauh mana perencanaan dan pengelolaan pariwisata didukung secara struktural oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

2.6 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan secara saling melengkapi untuk

memberikan gambaran yang utuh mengenai kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania.

1.Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari para informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa yang terlibat dalam bidang pariwisata dan pembangunan, perwakilan BUMDes, tokoh masyarakat, pemuda desa yang aktif dalam kegiatan wisata, serta pelaku UMKM lokal. Data primer ini berfungsi sebagai sumber utama untuk menggali pandangan, pengalaman, serta dinamika kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata Kampong Galung.

2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data ini mencakup dokumen RPJMDes Barania, laporan kegiatan wisata, peraturan desa terkait pariwisata, data profil Desa Barania, serta dokumentasi visual seperti foto, brosur, dan catatan rapat desa. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap temuan di lapangan serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap praktik pengelolaan wisata.

2.7 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali secara mendalam proses, bentuk, dinamika, dan efektivitas kemitraan antara pemerintah Desa Barania dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung. Fokus ini dipilih karena pengembangan pariwisata berbasis desa tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kolaborasi yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah desa. Teori Collaborative Governance digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami bagaimana hubungan kemitraan dibangun, dijalankan,

serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola wisata yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun subfokus penelitian ini meliputi:

1. Bentuk dan Pola Kemitraan

Mengkaji bagaimana bentuk kerja sama dan mekanisme kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung, termasuk peran masing-masing aktor, mekanisme komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama.

2. Proses Collaborative Governance

Menelusuri bagaimana proses kolaborasi berlangsung antara pemerintah desa dan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengelolaan wisata.

3. Faktor Pendukung Kemitraan

Mengidentifikasi elemen-elemen yang memperkuat keberhasilan kemitraan, seperti dukungan kebijakan, kepercayaan antaraktor, peran kelembagaan, serta partisipasi masyarakat.

4. Faktor Penghambat Kemitraan

Menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam membangun kolaborasi, seperti lemahnya kelembagaan, kurangnya partisipasi, keterbatasan sumber daya, atau kesenjangan komunikasi.

2.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik ini terdiri dari tiga tahapan utama yang berlangsung secara bersamaan dan

berulang, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Tahap pertama dalam analisis adalah melakukan reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian, seperti bentuk kemitraan, tingkat partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata Kampong Galung, dipertahankan dan dikelompokkan sesuai tema-tema tertentu. Reduksi data ini membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang benar-benar penting dan mendukung tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks yang menggambarkan pola-pola hubungan antar kategori tematik. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi sosial yang dikaji, khususnya dinamika kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penyajian data difokuskan pada bentuk-bentuk kerja sama, kendala, dan faktor pendukung dalam pengelolaan wisata Kampong Galung.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ini tidak bersifat final sejak awal, tetapi terus diverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada, membandingkan antar sumber informasi, dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan (teori Collaborative Governance). Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

Melalui pendekatan analisis interaktif ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pola kemitraan dalam pengelolaan wisata di Kampong Galung, Desa Barania.

4. Penggunaan Teori Collaborative Governance dalam Analisis

Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance sebagai kerangka analisis utama untuk memahami secara mendalam dinamika kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Kampong Galung di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat. Teori ini relevan karena menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor negara dan non-negara dalam proses pengambilan keputusan publik, pelaksanaan program, serta pencapaian tujuan pembangunan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa diposisikan sebagai aktor utama penyelenggara tata kelola wisata, sementara masyarakat (termasuk pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok lokal lainnya) dipandang sebagai mitra strategis yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wisata. Analisis dilakukan dengan menelusuri empat komponen utama Collaborative Governance Framework menurut Ansell & Gash (2008):

Starting Conditions (Kondisi Awal)

Menganalisis kondisi awal hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, termasuk tingkat kepercayaan, sejarah kerja sama, ketimpangan kekuasaan, dan kapasitas kelembagaan.

Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Melihat bagaimana struktur kelembagaan dan mekanisme formal maupun informal dibentuk untuk memfasilitasi proses kolaboratif dalam pengelolaan wisata.

Facilitative Leadership (Kepemimpinan Kolaboratif)

Mengidentifikasi peran kepemimpinan desa dalam membangun kepercayaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga proses kolaborasi tetap berjalan efektif.

Collaborative Process (Proses Kolaboratif)

Menelaah bagaimana proses interaksi, negosiasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Penggunaan teori ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kemitraan secara sistematis dan terstruktur, bukan hanya sebatas deskriptif. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kolaborasi terbentuk, tantangan yang dihadapi, serta faktor keberhasilan dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini juga memperkuat argumentasi bahwa pengembangan desa wisata tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat secara aktif dan setara.